

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan salah satu bagian kecil dari instansi pemerintah yang juga memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas. Desa merupakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan desa mempunyai hak dan kewenangan untuk mengatur tatanan sendiri agar teratur karena sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan . Tujuan dari keuangan desa sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas kehidupan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan mengatur tatanan rumah tangga, mengelola keuangan, memilih pemimpin, dan mendorong Pembangunan. Hal ini disebabkan Desa memiliki kewenangan dalam mengatur keuangannya sendiri seperti yang tertulis pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas nyata dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi desa seluas luasnya yaitu memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya desa secara optimal agar tidak disalah gunakan atau terjadi penyimpangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD

Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Sumber pendapatan ini tercatat didalam Laporan Keuangan APBDes.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana tahunan yang menggambarkan keuangan desa yang berupa file atau dokumen yang berisi semua anggaran yang terjadi di desa selama periode waktu berjalan. Asas *Good Governance* sangat penting untuk pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu maka harus dilakukannya sebuah analisis yang dilakukan untuk menilai kinerja keuangan Desa menunjukkan bahwa asas tersebut harus diterapkan oleh semua pihak yang berkepentingan dapat menemukan laporan keuangan sebagai hasil dari proses akuntansi.

Kinerja merupakan suatu tingkat pencapaian terhadap apa yang direncanakan, baik secara pribadi ataupun oleh organisasi (Harahap, 2017) Penilaian kinerja sangat penting untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada publik, organisasi dan manajer harus meningkatkan retensi karyawan mereka. Aksesibilitas lebih dari sekedar alat untuk menentukan bagaimana dana publik dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu program atau kegiatan (Ropa, 2016).

Analisis rasio yang digunakan dalam laporan keuangan ini yaitu : analisis rasio kemandirian, analisis rasio efisiensi, analisis rasio efektivitas, analisis rasio pertumbuhan, dan analisis rasio keserasian (Ayuni and Ardhiarisca, 2022). Penelitian yang mengenai pengukuran kinerja sudah pernah dilakukan pada tahun sebelumnya pada obyek yang berbeda . Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah Desa yang dilakukan oleh (Rohman, 2020) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu)”. Hasil penelitian menemukan bahwa rasio kemandiriannya masih sangat kurang, rasio efisiennya sudah baik dan dapat dikategorikan efisien, untuk rasio kemandiriannya terhadap pemerintah provinsi atau kabupaten masih sangat tinggi, dan rasio aktivitasnya masih belum seimbang antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dan selanjutnya penelitian

yang dilakukan oleh (Lestari, 2020). yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anggaran pendapatan asli desa (PAD), dengan realisasi pendapatan asli desa pada tahun kedua 100% termasuk dalam kategori anggaran yang efektif, meskipun perhitungan rasio efisiensi menunjukkan rata-rata 95,9% , dengan komponen realisasi pengeluaran termasuk dalam kategori anggaran yang kurang efisien.

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dalam penelitian akan dilakukan penelitian terkait kinerja keuangan Pemerintah Desa dengan menggunakan pengukuran analisis rasio keuangan yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan. perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada obyek penelitiannya yaitu Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember.

Desa Sumberwringin adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Jember. Sebagian besar orang yang tinggal di Desa Sumberwringin bekerja di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa dimana potensi pertaniannya antara lain pangan dan perkebunan, serta potensi peternakan. Desa Sumberwringin memiliki banyak potensi, tetapi memiliki beberapa masalah. Salah satunya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan PAD, yang mengakibatkan kurangnya transparansi dana desa. Dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi desa yang harusnya ada pengelolaan batu piring dan perkebunan tetapi hasil dari potensi tersebut tidak di setorkan kepada pemerintah desa sehingga PAD desa hanya mengandalkan tanah kas desa dan bumdes, tetapi bumdes ini tidak terlalu berkembang bahkan di tahun 2018 sampai 2022 Bumdes ini sudah tidak aktif lagi sehingga desa ini masih berkembang oleh karena itu bisa berdampak kepada rasio efektivitasnya. Dampak dari wabah Covid-19 juga berdampak pada rasio kinerja keuangan yang terlihat dari turunnya berbagai aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu perlu adanya evaluasi kinerja keuangan guna mengetahui dan menilai pengelolaan keuangan yang dilakukan selama periode tersebut sudah cukup baik atau tidak.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah di jelaskan, peneliti ingin melakukan penelitian lebih dalam mengenai kinerja keuangan pemerintah Desa Sumberwringin, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember Tahun 2019-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari pendahuluan diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember berdasarkan Rasio Kecerassian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian dan Rasio Pertumbuhan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember berdasarkan Rasio Kecerassian, Rasio Efisiensi, Rasio Efektifitas, Rasio Kemandirian, Rasio Pertumbuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan dan manfaat diatas, penelitian ini akan bermanfaat bagi :

1. Akademis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan informasi tambahan tentang analisis kinerja keuangan Pemerintah Desa. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian terkait yang serupa.
2. Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bagaimana kinerja pemerintahan desa.

3. Pemerintah Desa, diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi kepada pemerintah desa tentang penilaian kinerja di Desa Sumberwringin Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember. Ini akan membantu pemerintah desa menjadi lebih transparan kepada masyarakat dan masyarakatnya di masa mendatang.

